

**VISI PEMBANGUNAN DALAM PJP II**  
**Gambaran Masyarakat Indonesia Tahun 2018 dan Tantangannya Bagi Aparatur Negara**

**Oleh:**  
**Ginandjar Kartasasmita**  
**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan Pada Seminar Pendayagunaan Aparatur Negara**  
**Jakarta, 7 Juli 1997**

## **I. Pendahuluan**

Sebagai bangsa, kita patut bersyukur karena telah mempunyai nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, sebagai landasan bagi segenap upaya pembangunan kita.

Upaya pembangunan kita dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) dilandaskan pada GBHN 1993, yang telah meletakkan dasar-dasar dan arahan bagi upaya pembangunan, bukan hanya untuk Repelita VI melainkan untuk kurun waktu 25 tahun ke depan, sebagai kelanjutan, peningkatan dan perluasan upaya pembangunan dalam PJP I.

Amanat GBHN 1993 tersebut, telah dirumuskan dalam Repelita VI yang bukan hanya memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya selama kurun waktu Repelita VI tetapi juga telah menetapkan sasaran-sasaran, meskipun dalam garis-garis besarnya saja, untuk seluruh PJP II. Sebagian di antara sasaran-sasaran itu telah dinyatakan secara kuantitatif meskipun sebagian besar lagi masih bersifat kualitatif. Sasaran yang dinyatakan secara kualitatif, memang ada yang harus dinyatakan secara kualitatif, tetapi ada juga sebagian yang dinyatakan secara kualitatif oleh karena kita belum dapat memperhitungkan secara pasti berbagai aspek yang membentuk atau mempengaruhinya, sehingga untuk sementara sasaran-sasaran tersebut dinyatakan secara kualitatif. Namun, secara bertahap, repelita demi repelita kita harapkan akan dapat dikuantifikasikan.

## **II. Pokok-pokok Pikiran Dalam Merancang Masa Depan**

Kita menyadari akan keterbatasan pengetahuan kita, dan juga umat manusia pada umumnya, mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.<sup>1</sup> Salah satu faktor yang amat menentukan, dan justru menjadi salah satu penyebab ketidakpastian adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Banyak hal yang sekarang sudah diterima secara luas, sepuluh tahun yang lalu belum terpikirkan atau baru jadi angan-angan.

Setelah menyatakan hal-hal di atas, betapa pun kita sadari banyak variabel yang

---

1 Dalam keadaan demikian tentu makin sulit merancang masa depan. Betapapun canggihnya perangkat-perangkat pemrakira yang dimiliki manusia menjelang akhir abad ke-20, tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan runtuhnya komunisme dua tiga tahun sebelumnya. Kita ingat betapa George Orwell mengkhawatirkan keadaan dunia dalam bukunya "1984". Atau betapa Club of Rome yang mempertajam hipotesis Malthus memperkirakan malapetaka dunia sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya alam dibanding penambahan penduduk. Semuanya itu ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, tidak sedikit perubahan yang kini terjadi dan berdampak pada sistem ekonomi, sosial dan politik yang tidak terpikirkan pada satu atau dua dekade yang lalu, kini menjadi kenyataan. Misalnya, kemampuan teknologi mikroelektronika yang telah memungkinkan makin mengecilnya ukuran microprocessor komputer, namun, dengan kemampuan yang makin meningkat, telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang.

berada di luar kekuasaan kita dan perkembangan-perkembangannya yang tidak selalu dapat diduga, tidak dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki visi masa depan. Artinya, kita tidak hanya menyerah kepada nasib atau perkembangan keadaan. Paling tidak untuk 25 tahun ke depan kita sudah mempunyai gambaran tentang wujud masa depan yang kita harapkan atas dasar perkiraan-perkiraan berdasarkan pengetahuan yang ada pada kita sekarang.

Dalam konteks pembangunan negara kita, formulasi tentang masyarakat yang kita cita-citakan itu sendiri, adalah amanat GBHN 1993, yaitu bahwa masyarakat baru itu adalah yang **maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera**. Dalam alur itu, kita menyusun pikiran-pikiran kita mengenai masa depan, dan merancang upaya kita untuk mewujudkannya.

Membangun masyarakat baru masa depan tidak dapat tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ideal dan dimensi pragmatis. Idealisme ini penting untuk memberikan arah serta untuk menjaga agar bangsa kita tidak kehilangan jatidirinya sebagai bangsa.

Kita juga harus pragmatis, karena mewujudkan sesuatu yang ideal memerlukan waktu yang lama, bahkan akan merupakan upaya yang tidak ada hentinya. Dengan prinsip pragmatis kita menyusun tahap dan jadwal, dan membuat agenda-agenda untuk tahap-tahap tersebut. Dalam melakukan upaya itu, kita mempertimbangkan kondisi kita sekarang, potensi yang dapat dikembangkan, serta kendala dan tantangannya. Atas dasar itu kemudian kita tetapkan berbagai sasaran dan tolok ukur.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat baru masa depan itu, seperti negara-negara lain yang telah lebih dahulu maju, kita menempatkan industrialisasi sebagai porosnya pembangunan.<sup>2</sup>

Industrialisasi bukanlah hanya memperbanyak jumlah pabrik, tetapi menyangkut proses pergeseran struktural dan kultural yang amat mendasar dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.<sup>3</sup>

### III. Tantangan Pembangunan di Masa Depan

Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk pembangunannya, baik yang bersumber dari momentum pembangunannya sendiri, dari potensi nasional yang dapat dikembangkan, maupun dari peluang-peluang yang terbuka dari perkembangan lingkungan regional dan internasional. Namun, kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang harus dapat diatasi apabila kita ingin mencapai kemajuan yang optimal.

Tantangan itu dapat berasal dari luar maupun dari dalam; dan karena dunia sedang bergerak ke arah apa yang disebut "*borderless society*" (disebabkan oleh arus informasi yang sudah tidak dapat dibendung lagi), makin sulit bagi kita untuk membedakan apakah suatu tantangan berasal dari luar atau dari dalam.

Meskipun tidak mudah untuk memilah-milah dan mengelompokkannya dalam bidang atau sektor, beberapa aspek tantangan sudah dapat dikenali karena sejak sekarang pun sudah menjadi masalah bagi kita. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ini.

---

2 Pengalaman empiris menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian terkonsentrasi pada sektor modern yang umumnya ada di sektor industri. Demikian pula potensi pengembangan tabungan juga berada pada sektor modern sehingga penanaman modal yang tumbuh relatif cepat terjadi di sektor industri. Di samping itu, peran tenaga kerja terampil di sektor industri lebih tinggi dibanding sektor primer, sebagaimana tercermin dari tingkat upahnya.

3 Modern di sini tidak sama dengan "barat", tetapi terbuka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru sesuai dengan perkembangan zaman.

*Pertama*, tantangan di bidang ekonomi sehubungan dengan proses globalisasi. Kurun waktu Repelita VII akan bersamaan dengan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2003. Dengan kawasan perdagangan bebas ini, ekonomi Indonesia akan makin terintegrasi ke dalam ekonomi ASEAN. Kurun waktu PJP II bersamaan dengan sasaran APEC tahun 2020. Berbagai perkembangan tersebut membuka kesempatan yang luas bagi perekonomian kita, tetapi juga menghadapkannya pada tantangan-tantangan.

Globalisasi atau proses transformasi global yang sekarang sedang berlangsung dalam kehidupan umat manusia menyangkut seluruh aspek kehidupan, yakni politik, kebudayaan, dan ekonomi. Satu sama lain, aspek-aspek itu saling mempengaruhi.

Di bidang ekonomi, proses transformasi global itu digerakkan oleh dua kekuatan besar, yakni perdagangan dan teknologi. Keduanya kait-mengait dan saling menunjang. Perdagangan yang meningkat akan mendorong bukan hanya proses alih teknologi, tetapi penguatan teknologi. Sebaliknya, peningkatan teknologi akan memperlancar dan mendorong arus barang dan jasa.

Tingkat perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang paling menentukan perbedaan dalam taraf kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini terkait erat dengan masalah kualitas SDM.

*Kedua*, masalah ketidakseimbangan dalam memperoleh kesempatan atau kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan. Ketidakseimbangan itu menghasilkan masalah kesenjangan. Kesenjangan merupakan masalah yang sangat dirasakan oleh masyarakat, baik kesenjangan antargolongan pendapatan maupun antardaerah.

Masalah kesenjangan, termasuk masalah pengangguran, tidak hanya berakhir di bidang ekonomi, tetapi akan merambat pada persoalan sosial yang sangat peka dan akan mempengaruhi kehidupan politik. Selain dari pengalaman kita sendiri, pengalaman bangsa-bangsa lain mengajarkan kita juga tentang potensi perpecahan dan pertikaian politik karena kesenjangan.

*Ketiga*, keterbatasan sumber daya. Dalam upaya pembangunan, kita menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, sumber dana pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

*Keempat*, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Proses modernisasi bukanlah semata-mata proses transformasi yang berlangsung di bidang ekonomi, tetapi juga, dan bahkan terutama adalah proses budaya.

Menjadi tantangan yang tidak kecil untuk menjaga agar upaya pembangunan sebagai proses modernisasi, sebagai proses budaya, berjalan dengan serasi, dan masyarakat dapat menyerap nilai-nilai baru yang dibutuhkan untuk pembangunan sesuai perkembangan zaman, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai hakiki yang mencerminkan kepribadian dan jatidiri bangsa Indonesia.

*Kelima*, tantangan dalam pembangunan di bidang politik. Bersamaan dengan pengaruh-pengaruh ekonomi dan sosial budaya seperti dikemukakan di atas, di bidang politik kita menghadapi tantangan tersendiri.

Masalahnya, bukan hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga di bidang politik, nilai-nilai dalam kebudayaan politik dan praktik-praktik politik kita akan terus-menerus ditantang dan diuji. Oleh karena itu, tantangan kita di masa mendatang adalah bagaimana melanjutkan pembangunan politik, agar tetap berada dalam arah yang kita kehendaki, dan menyalurkan aspirasi politik yang berkembang dalam masyarakat ke dalam alur etika dan budaya politik Pancasila.

#### IV. Gambaran Masyarakat Indonesia di tahun 2018

Dengan berlandaskan amanat GBHN, dan berlandaskan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta menyadari tantangan-tantangan yang cukup berat yang harus dapat diatasi seperti antara lain terurai di atas, maka kita telah merancang masa depan, sampai akhir PJP II, yaitu tahun 2018. Beberapa pokoknya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan nyata dan cukup berarti. Laju pertumbuhan ekonomi diusahakan untuk tercapai dan terpelihara pada tingkat yang cukup tinggi. Selama PJP II kita perkirakan rata-rata di atas 7 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk akan ditekan menjadi di bawah 1 persen. Dengan demikian, dalam 25 tahun pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kali dalam nilai riil.<sup>4</sup>

Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, ekonomi Indonesia pada waktu itu sudah akan berkembang menjadi ekonomi yang besar (sekitar US\$ 980 miliar dengan harga tahun 1993). Bahkan apabila disesuaikan daya beli relatifnya (*purchasing power parity*) akan menjadi sekitar US\$ 2,0 triliun.<sup>5</sup>

Volume ekonomi yang meningkat demikian besar akan menjadi pasar yang dinamis, dan dengan demikian menjadi pendorong bagi pertumbuhan produksi dalam negeri. Pasar ekspor yang diperkirakan juga akan berkembang, dengan perdagangan dunia yang makin tanpa hambatan dimulai dengan kawasan kita sendiri (AFTA dan APEC), masih tetap akan merupakan penunjang pertumbuhan industri.

*Kedua*, dengan dinamika ekonomi yang demikian, proses transformasi struktural akan terus berlangsung.

Peran sektor industri dalam perekonomian akan makin meningkat menjadi sekitar sepertiga pada akhir PJP II dari sekitar seperlima pada akhir PJP I.

Dengan besaran produksi dan sifat-sifat struktural yang demikian, ekonomi Indonesia pada akhir PJP II sudah akan tergolong ekonomi industri (*industrialized economy*).<sup>6</sup>

Dalam pengertian itu, tidak berarti sektor pertanian menjadi tidak penting. Sektor ini akan tetap penting, tetapi ditangani dengan cara yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dengan penerapan teknologi, dengan sumber daya manusia pertanian yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dalam pengertian itu bidang pertanian sesungguhnya telah ditangani secara industri, atau kita sebut dengan pertanian yang berbudaya industri.

Perubahan juga akan terjadi pada struktur ketenaga kerjaan. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa akan makin cepat. Angkatan kerja akan makin terdidik, sekurang-kurangnya sudah berpendidikan 9 tahun dan sebagian besar 12 tahun dengan keterampilan yang lebih baik.<sup>7</sup> Peran tenaga profesional, teknisi, dan

---

4 Sebagai perbandingan selama PJP I pendapatan rata-rata per kapita kita meningkat tiga kali dalam nilai riil dan 11 kali menurut harga berlaku. Juga sebagai perbandingan pada masa PJP II itu, pendapatan rata-rata negara-negara Eropa diperkirakan hanya akan meningkat dua kali.

5 Dengan ukuran itu, ada yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan menempati urutan ke-5 atau ke-6 terbesar di dunia.

6 Hal ini erat kaitannya dengan proses akumulasi, yang tercermin dalam beberapa aspek, antara lain (1) peningkatan kuantitas dan kualitas stok modal per tenaga kerja melalui peningkatan tabungan nasional dan investasi; (2) peningkatan efisiensi penggunaan barang modal melalui proses *learning by doing*; (3) perbaikan teknologi baik dalam bentuk *technical know-how* maupun kemampuan manajerial.

7 Selambat-lambatnya pada Repelita VIII pendidikan dasar 9 tahun telah dituntaskan dan telah mulai

ketatalaksanaan akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita.

*Ketiga*, proses ini akan mendorong terbentuknya lapisan menengah yang makin kuat, yang akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal.

Hal ini berkaitan erat dengan perbaikan dalam struktur dunia usaha. Dalam PJP II diharapkan berkembang lapisan usaha menengah yang kukuh, yang akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang makin kuat, dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas basisnya. Kita akan dan harus mengusahakan agar dalam dunia usaha tercipta keseimbangan yang adil antara usaha besar, menengah, dan kecil. Berbagai kebijaksanaan ekonomi dengan didukung oleh peraturan perundangan harus ditujukan ke arah itu.

*Keempat*, seperti halnya negara industri lainnya, pada saat itu Indonesia sudah akan makin kuat ketahanan ekonominya. Lembaga-lembaga ekonomi yang penting bagi masyarakat sudah berfungsi dengan mantap dan bekerja dengan efisien. Ketergantungan pada alam sudah sangat berkurang.<sup>8</sup> Tata niaga sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip pasar dan bersifat transparan. Dengan demikian, fluktuasi dalam persediaan bahan pokok di dalam negeri sudah tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara.

*Kelima*, kemandirian dalam pembiayaan pembangunan telah tercapai. Pada akhir PJP II Indonesia sudah bukan lagi negara yang menerima pinjaman lunak. Neraca pembayaran sudah akan mantap. Kita akan makin mengandalkan perolehan devisa dan kesehatan neraca pembayaran luar negeri dari perdagangan barang dan jasa, termasuk pariwisata dan jasa tenaga kerja, dan tidak lagi dari bantuan luar negeri. Hal ini sejalan dengan kemampuan pembangunan yang makin mandiri.<sup>9</sup>

*Keenam*, masalah kemiskinan absolut telah terselesaikan. Bagaimana pun, kemajuan ekonomi hanya akan ada artinya bagi kesejahteraan rakyat, apabila rakyat dapat menikmati dan merasakannya sebagai perbaikan hidup yang nyata. Oleh karena itu, dalam PJP II, salah satu program yang terpenting adalah penanggulangan kemiskinan. Kita mengharapkan, pada akhir Repelita VII masalah kemiskinan absolut, artinya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian besar sudah akan terselesaikan. Mungkin hanya tersisa di kantung-kantung kemiskinan yang sulit terjangkau, yang upaya penanggulangannya akan dilanjutkan sehingga sebelum PJP II berakhir masalah ini telah tuntas terselesaikan.

*Ketujuh*, kesenjangan pembangunan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan makin berkurang. Meskipun dalam 25 tahun belum mungkin dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat diupayakan adalah mencegah agar jurang kesenjangan tidak makin melebar. Kawasan tertinggal akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap ketertinggalan, dan dapat turut melaju dalam arus kemajuan ekonomi bersama kawasan lainnya yang telah lebih dulu berkembang.<sup>10</sup>

---

dilanjutkan dengan pendidikan universal 12 tahun seperti halnya yang berlaku di negara-negara industri pada umumnya.

- 8 Pengaruh cuaca dan perkembangan alam lainnya tidak lagi berdampak luas pada perekonomian nasional seperti halnya selama ini. Dengan intensifikasi dan teknologi pertanian, peningkatan produksi menjadi lebih terjamin. Stabilitas ekonomi tidak lagi akan didominasi oleh keadaan pangan.
- 9 Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada aliran modal dari luar negeri, karena dengan globalisasi ekonomi, modal akan mengalir keluar masuk dengan leluasa. Juga tidak berarti bahwa tidak akan ada pinjaman terutama dari dunia usaha, karena pinjam-meminjam adalah praktik yang biasa dalam kehidupan ekonomi. Namun, pinjaman tidak merupakan faktor yang terlalu menentukan kesehatan perekonomian.
- 10 Misalnya, kawasan Indonesia sebelah timur akan dipercepat laju pertumbuhannya dengan berbagai inisiatif agar dapat mencapai di atas rata-rata pertumbuhan kawasan sebelah barat. Pada akhir PJP II,

*Kedelapan*, kesejahteraan rakyat yang makin meningkat juga akan tercermin pada derajat kesehatan yang makin baik. Dalam PJP II, umur harapan hidup diharapkan dapat meningkat menjadi 71 tahun.<sup>11</sup> Keadaan kesehatan dan gizi masyarakat sudah akan makin membaik. Upaya ke arah itu akan dimulai sejak usia dini, dengan berbagai program perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat yang makin meluas jangkauannya dan meningkat kualitasnya.<sup>12</sup> Dengan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang makin baik tersebut produktivitas SDM juga akan meningkat.

*Kesembilan*, pada akhir PJP II penduduk Indonesia sudah menjadi penduduk perkotaan. Artinya, penduduk perkotaan yang pada tahun 1995 berjumlah sekitar 69,9 juta atau 35,9 persen dari total penduduk,<sup>13</sup> akan meningkat menjadi sekitar 155 juta atau sekitar 60 persen dari total penduduk.

Dalam jangka 25 tahun ke depan di Indonesia akan tumbuh 3 kota megapolitan, 9 kota metropolitan dan 12 kota besar baru. Perkembangan kota tersebut sejalan dengan transformasi ekonomi yang berkaitan erat dengan proses urbanisasi.<sup>14</sup>

*Kesepuluh*, secara keseluruhan proses transformasi ekonomi, akan berjalan bergandengan dengan transformasi budaya. Bangsa Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang makin tinggi, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin canggih, dan dengan interaksi yang makin intensif dengan dunia internasional, akan cepat tumbuh menjadi bangsa yang modern.

Manusia Indonesia pada akhir PJP II akan berpendidikan lebih tinggi,<sup>15</sup> lebih sehat, pengetahuan umumnya lebih luas, sehingga dengan demikian makin cerdas dan pekerjaannya makin terspesialisasi. Ia akan senantiasa membandingkan dirinya dengan bangsa lain. Ia tidak ingin jauh tertinggal, dan dirangsang untuk terus mengejar ketertinggalan.

Transformasi ekonomi dan budaya tersebut akan terjadi pada seluruh lapisan penduduk, baik penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan. Meskipun tentunya hal itu terjadi dengan laju yang berbeda, karena pertumbuhan di perkotaan akan lebih cepat dibandingkan dengan perdesaan.

*Kesebelas*, pada akhir PJP II, kualitas demokrasi akan makin meningkat, sebagai hasil dari

---

prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di kawasan sebelah timur sudah dapat menunjang pembangunan dan kegiatan ekonomi sehingga industri dapat berkembang.

- 11 Pada awal pembangunan usia harapan hidup diperkirakan 45,7 tahun, dan pada akhir PJP I (1993/94) meningkat menjadi 63 tahun.
- 12 Salah satu program pokok ke arah itu adalah program makanan tambahan untuk murid sekolah dasar (SD), yang pada akhir Repelita VII nanti diharapkan sudah mencakup seluruh murid SD.
- 13 Menurut Survei Penduduk Antar Sensus 1995.
- 14 Urbanisasi membawa berbagai dampak dalam pembangunan. Dari sisi negatifnya, urbanisasi menimbulkan eksese-eksese dan masalah-masalah sosial, oleh karena itu perlu dikendalikan lajunya. Akan tetapi juga ada sisi positifnya. Meningkatnya konsentrasi penduduk dalam proses urbanisasi memungkinkan penyediaan pelayanan sosial dan berbagai kebutuhan dasar menjadi lebih mudah. Hal itu tercermin antara lain dari lebih baiknya mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Perkembangan wilayah perkotaan juga akan mendorong majunya wilayah perdesaan sekitarnya. Selain itu, urbanisasi juga akan mengurangi tekanan penduduk di daerah perdesaan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
- 15 Selain telah tercapainya pendidikan dasar 9 tahun, 80 persen anak usia pendidikan menengah mengikuti SLTA dan 25 persen usia mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi.

peningkatan kualitas lembaga-lembaga sosial politik serta kualitas para pelakunya. Kehidupan masyarakat yang makin transparan, akan tercermin bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya termasuk di bidang politik.

Pada tahun 2020 Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Dalam usia itu bangsa Indonesia sudah kukuh kuat ketahanan nasionalnya. Penghayatan ideologi Pancasila sudah meresap, membudaya dan tidak tergoyahkan. Kehidupan nasional telah berjalan di atas landasan konstitusi dengan mantap. Persatuan dan kesatuan bangsa telah terjalin dengan kukuh sehingga kemajemukan telah sungguh-sungguh menjadi modal dan kekuatan bangsa, dan bukan menjadi penyebab perpecahan. Dengan demikian nilai-nilai yang dikandung dalam Wawasan Nusantara telah mewujudkan dalam budaya bangsa.

*Kedua belas*, pada akhir PJP II, hukum telah makin mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum, yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan dan taraf pendidikan rakyat, akan meningkat pula tuntutan akan keadilan. Jalan yang paling utama bagi diperolehnya keadilan adalah hukum. Tidak ada negara yang maju dan modern, yang tidak bersendikan hukum, atau hanya bersendikan kekuasaan belaka. Hukumlah yang akan melindungi masyarakat dan setiap warga negara. Birokrasi pemerintah juga akan meningkat kualitas dan kinerjanya, sebagai hasil dari perbaikan kualitas sumber daya manusianya, kesejahteraannya, serta penyempurnaan dalam kelembagaannya.

*Ketigabelas*, di bidang pertahanan keamanan negara, yang sejak awal pembangunannya diupayakan tetap konsisten mempedomani sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, pada akhir PJP II segenap komponennya telah tertata dan berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan bangsa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat telah tertata dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan. Komponen ABRI yang profesional, efektif, efisien, dan modern telah mencapai kemampuan optimal baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik, dengan didukung oleh mantapnya kemanunggalan ABRI-rakyat, serta mantapnya keterpaduan dan kesiapan komponen-komponen pendukung.

*Keempat belas*, kita ditantang untuk menyasikan kebutuhan akan ruang dan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan, agar pembangunan kita berkelanjutan. Dengan pengalaman yang panjang, dan kesadaran yang kuat akan artinya memelihara lingkungan, dalam 25 tahun mendatang ini bangsa Indonesia akan menemukan formula keseimbangan antara kebutuhan pemakaian dan pelestarian sumber alamnya. Semuanya itu menjurus pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Demikianlah secara sangat ringkas gambaran masa depan yang ingin kita tuju dalam beberapa segi pokoknya. Dengan wujud masa depan yang demikian, Indonesia sudah akan menjadi bangsa industri yang maju dan modern, dan berdiri di atas landasan kemandirian pada sekitar akhir PJP II. Kita akan mencapai tahap yang memungkinkan bangsa ini untuk tumbuh selanjutnya dengan kekuatannya sendiri, dengan memanfaatkan dinamika perkembangan ekonomi internasional yang terus didorong oleh keterbukaan dan integrasi ekonomi serta kemajuan teknologi.

## **V. Tantangan Bagi Aparatur Negara**

Semuanya itu tidak mungkin dapat terjadi tanpa administrasi yang menunjangnya. Bahkan proses pembangunan di negara mana pun, sangat dipengaruhi oleh kinerja administrasinya. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena birokrasi menghambat dan tidak menunjang pembangunan.

Oleh karena itu, visi tadi hanya bisa terwujud apabila didukung oleh administrasi yang memadai untuk membuat segala potensi yang dimiliki bangsa bergerak menuju ke arah itu. Ini menjadi tantangan bagi kita. Jawabannya tentu saja tidak akan mudah, dan memerlukan pemikiran yang mendalam.

Tantangan yang dihadapkan pada kita ada dua:

- (1) bagaimana konsep aparatur negara khususnya birokrasi yang sesuai dengan atau yang dapat menunjang terwujudnya masa depan yang diinginkan itu;
- (2) bagaimana menciptakan wujud aparatur negara yang demikian.

Inilah saya kira yang ingin dibahas dalam Seminar ini.

Dalam rangka itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai tantangan yang harus dipecahkan dalam Seminar ini.

*Pertama*, bagaimana memenuhi kebutuhan suatu masyarakat modern, yang menuntut aparatur negara yang modern. Banyak pengalaman empiris dan literatur yang dapat digunakan sebagai rujukan mengenai sosok aparatur negara modern dan harus kita upayakan untuk menerapkannya ke dalam sistem aparatur kita. Modern tidak berarti semata-mata peralatannya yang modern, tetapi sikap dan budaya serta nilai-nilai yang menyemangatnya modern.

*Kedua*, aparatur yang demikian haruslah diisi oleh orang-orang yang profesional, yakni yang berkarakter, mempunyai kemampuan dalam suatu bidang yang ditekuninya dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya. Oleh karena itu, *transparancy* dan *accountability* merupakan unsur penting dalam sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus menjiwai aparatur negara yang demikian. Hanya dengan memiliki sifat-sifat itu aparatur dapat membangkitkan rasa hormat dan berwibawa.

*Ketiga*, tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya.

Juga peka tanggap kepada perubahan. Karena kehidupan masyarakat bersifat sangat dinamis dan perubahannya terjadi dengan frekuensi yang makin cepat, didorong oleh (1) cepatnya meningkat keinginan untuk hidup lebih baik, dan (2) perkembangan teknologi. Aparatur bahkan bukan hanya peka terhadap angin perubahan, tetapi harus memeloporinya dan mengarahkannya ke arah perbaikan.

*Keempat*, peran individu dan masyarakat dalam kehidupan modern akan makin besar, sehingga aparatur harus dapat menempatkan fungsinya secara tepat agar berjalan seiring dan saling menunjang dengan peran masyarakat yang makin besar itu.

*Kelima*, dunia yang makin menyatu menyebabkan makin kaburnya batas-batas negara, bahkan beberapa pakar mengatakan batas-batas kedaulatan. Kehidupan manusia yang mengglobal, menjadikan makin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi dan karenanya menjadi tantangan pula bagi aparatur dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan (*policies*).

Tidak berhenti di situ saja pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam upaya pendayagunaan aparatur negara menyongsong zaman dunia baru yang sudah di ambang pintu dan dalam mewujudkan visi masa depan yang kita kehendaki itu.

Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan menghasilkan berbagai rekomendasi. Misalnya, apakah birokrasi kita dapat lebih dirampingkan, fungsi-fungsinya dipertajam, pegawainya dikurangi, persyaratan serta kualitasnya ditingkatkan, dan dengan upaya itu produktivitasnya ditingkatkan. Kita juga perlu secara khusus berbicara mengenai aspek kesejahteraan pegawai yang menjadi syarat bagi terciptanya birokrasi yang lebih baik.

## **VI. P e n u t u p**

Demikianlah, uraian ringkas mengenai visi pembangunan kita memasuki abad ke-21, sampai akhir PJP II.

Sesuai dengan tema seminar ini, uraian ringkas mengenai visi pembangunan di atas diharapkan dapat merangsang pemikiran dalam upaya kita mencari alternatif dalam strategi pembangunan yang bertumpu kepada manusia, dan dapat memberikan jawaban serta membantu menyempurnakan pikiran-pikiran yang ada selama ini dalam mempersiapkan sosok aparatur negara menyongsong abad 21 yang akan kita masuki pada Repelita VII nanti. Pada pokoknya kita harapkan pada akhir PJP II, bersamaan dengan tercapainya sasaran membangun bangsa industri yang maju, modern, dan mandiri, harus sudah terwujud pula organisasi pemerintah yang juga maju dan modern, yang didukung sosok aparatur yang efisien, efektif, andal, profesional, dan berkarakter menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Selamat bekerja.